

Ideologi Anti-Korupsi

Wahyudi Kumorotomo

Seorang sahabat peneliti asing pernah mengatakan pada saya bahwa orang Indonesia seringkali lantang berteriak anti-korupsi tetapi sesungguhnya perilaku sehari-hari mereka justru mendorong korupsi. Saya terbelalak ketika dia mengucapkan ini. Tetapi buru-buru dia mengemukakan contohnya: Hampir semua orang ketika ditanya tentang korupsi pasti mengatakan menolak. Tetapi lihatlah pengalaman ketika mereka di-Tilang oleh polisi, sebagian besar akan mengajak “damai” dan akhirnya menyuap polisi.

Saya benar-benar tercenung dengan contoh yang dikemukakan itu. Jangan-jangan kebanyakan orang Indonesia memang sudah telanjur sulit membedakan antara korupsi atau bukan, dan tanpa sadar sudah terbiasa melakukan sesuatu yang sebenarnya mendorong perilaku korup. Oleh sebab itu, pertanyaan yang mendasar adalah: Apakah kita memang punya ideologi anti-korupsi? Benarkah masyarakat benar-benar memang ingin menyingkahkan korupsi dari bumi Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan dengan apa yang belakangan ini terjadi, terutama untuk menyikapi konflik dalam penindakan korupsi antara KPK dan Polri. Kendatipun presiden SBY telah mengemukakan posisinya secara tegas (setelah didorong-dorong oleh publik yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui berbagai aksi maupun melalui media sosial), masih terbuka kemungkinan bahwa kebijakan presiden itu terhenti di tengah jalan atau dipelintir oleh para pembantunya sendiri. Dari pengalaman di banyak negara, korupsi memang hanya dapat diberantas apabila kebijakan anti-korupsi didukung kuat oleh mayoritas rakyat. Dengan kata lain, korupsi hanya dapat benar-benar dilawan apabila kita memiliki ideologi anti-korupsi yang kuat.

Secara kasat mata, serangan koruptor atau unsur-unsur yang mendorong korupsi itu tampak dari upaya pelemahan KPK beberapa waktu belakangan ini. Sebagian dari anggota DPR yang begitu getol ingin mengubah UU No.30/2002 mengenai KPK menyelipkan berbagai pasal baru tentang kewenangan penyadapan, pemutihan perkara korupsi atau lembaga pengawas KPK, yang ujung-ujungnya memandulkan KPK. Ini mudah dipahami karena memang cukup banyak anggota DPR yang pernah dituntut atau sedang dibidik oleh KPK. Resistensi Mabes Polri untuk menyerahkan perkara korupsi simulator SIM dan penggerudukan provost ke kantor KPK dengan dalih menangkap penyidik Novel Baswedan menunjukkan bahwa semangat korps Polri telah disalurkan ke arah yang salah sehingga sulit untuk menepis kesan bahwa Polri tidak secara tulus mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Untuk perkara korupsi yang melibatkan politisi, kita juga sudah sering mendengar kabar bagaimana pimpinan Parpol membuat pernyataan untuk “melindungi” tokohnya yang dianggap sedang menghadapi masalah. Dari asosiasi anggota dewan di daerah seperti Adeksi atau Adkasi, pernah juga ada pernyataan serupa. Jika perkara korupsi menyangkut Gubernur, Bupati atau Walikota, bukan tidak mungkin APPSI atau Apkasi akan melakukan pembelaan. Atas nama solidaritas dan pencarian kebenaran, daftar para pembela koruptor itu bisa begitu panjang.

Tentu saja, pembelaan semacam itu sah saja apabila tujuannya memang dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dalam upaya pembuktian, atau menjamin objektivitas keputusan hakim. Tetapi pembelaan yang dilakukan secara membabi-buta dan dilakukan secara sistematis hanya semakin menunjukkan bahwa masyarakat kita memang sudah begitu toleran terhadap korupsi. Oleh sebab itu, meskipun presiden SBY telah mengambil sikap untuk mendukung KPK, dukungan yang paling vital sebenarnya dari seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat harus dapat membedakan secara jelas perilaku yang mendorong korupsi dan sejak dini harus mampu menangkal atau mencegahnya.

KPK dan Polri adalah dua lembaga strategis yang sangat penting bagi penegakan hukum dalam perkara korupsi. Dukungan masyarakat terhadap KPK seperti tampak dalam media sosial dan aksi spontan harus terus ditunjukkan agar setiap kasus korupsi dapat disidik dan diusut tuntas oleh KPK. Sementara itu, pembersihan harus dilakukan terhadap institusi Polri yang belakangan ini citranya cenderung redup karena perilaku korup diantara pejabat petinggi dan oknum polisi di jalanan.

Penyelesaian kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka utama Irjen Djoko Susilo hendaknya menjadi momentum bagi Polri untuk membenahi diri kalau kalangan Polri benar-benar ingin memperbaiki citranya yang sedang terpuruk. Jika pemberantasan korupsi di tubuh Polri itu berhasil, masyarakat pasti akan memberikan apresiasi yang tinggi dan status Polri sebagai bhayangkara negara tentu akan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat.

Kasus yang melibatkan Irjen Djoko Susilo ini barangkali akan mirip dengan momentum pemberantasan korupsi oleh ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) di Hongkong pada tahun 1974. Ketika itu, Peter F. Godber yang merupakan *Chief Superintendent* kepolisian terbukti melakukan korupsi dari berbagai sumber sehingga kekayaannya mencapai 4,3 juta dolar. Upaya untuk mengadili Godber dihalangi dengan berbagai cara oleh korps polisi karena ketika itu memang jajaran kepolisian banyak mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi melalui kerjasama terselubung dengan Triad, mafia Hongkong.

Tetapi rakyat melakukan perlawanan sengit terhadap sistem yang korup di kepolisian itu dengan dukungan kepemimpinan Gubernur Murray MacLehose yang konsisten. Unjuk rasa terbuka dan tulisan opini yang menguatkan pemberantasan korupsi terus ditunjukkan oleh masyarakat. Berhadapan dengan para polisi di jalanan yang korup, masyarakat juga tidak mau lagi kompromi dan tidak ada lagi kerjasama yang mengarah ke transaksi korup. Perlawanan yang konsisten itu akhirnya membuahkan hasil. Godber yang sudah melarikan diri ke luar negeri pun dapat dipulangkan melalui ekstradisi oleh ICAC untuk kemudian diadili dan memperoleh hukuman yang setimpal. Sejak itu, sistem pemerintahan yang korup dengan kejahatan terorganisasi Triad di Hongkong dapat diberantas hingga tuntas.

Di sinilah pentingnya ideologi anti-korupsi untuk terus ditumbuhkan di Indonesia. Betapapun, lembaga penegak hukum seperti KPK punya keterbatasan jika korupsi sudah berurat dan berakar dalam sendi-sendi bisnis dan pemerintahan. Sikap tanpa kompromi terhadap korupsi bukan hanya merupakan tugas KPK atau para penegak hukum. Sikap masyarakat itu hendaknya bukan hanya terungkap di dalam wacana mencemooh korupsi (*public disdain*), tetapi harus benar-benar dipraktikkan secara konsisten oleh

semua unsur masyarakat (*public resistance*). Perjuangan untuk memberantas korupsi di Indonesia masih sangat panjang. Dan inilah tugas mulia yang harus dilakukan oleh setiap elemen bangsa.

Penulis adalah dosen Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM